

PENGARUH UPAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR

Syahrina Syam

Abdul Wahab

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Jalan HM Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa

Email: wahab.abd@ymail.com

Abstract *This study aims to determine the effect of wages and population growth on the unemployment rate in the city of Makassar. Data used in this study is a quantitative time series data from the years 2001-2011 on wages, population growth and the unemployment rate obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi Province, literature or books and reports related to writing this. Data collection technique is to perform a direct recording of the data used as the data rate of wage / UMP Makassar population growth and unemployment data on the number of Makassar, in the form of time series data from years 2001-2011 (11 years). The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis with the technique of Ordinary Least Square (OLS). Results of the study that simultaneously wages and population growth have a significant effect on the unemployment rate with partial Tests showed that wages and population growth positive and significant impact on unemployment in the city of Makassar*

Abstrak, *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif merupakan data time series dari tahun 2001-2011 tentang upah, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, literatur atau buku dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penulisan ini. Teknik pengumpulan data adalah melakukan pencatatan langsung mengenai data yang dipergunakan seperti data tingkat upah/UMP Kota Makassar jumlah pertumbuhan penduduk serta data jumlah tingkat pengangguran Kota Makassar, dalam bentuk time series data dari tahun 2001-2011 (11 tahun). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan teknik Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian bahwa secara simultan upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Makassar.*

Kata Kunci: *Tingkat Upah, Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran*

PENDAHULUAN

Negara berkembang umumnya menghadapi berbagai masalah mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga ke sektor lain tak terkecuali pada masalah ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi di negara berkembang pengangguran

yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonom tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari penambahan penduduk.

Bertambahnya jumlah penduduk akan selalu diwarnai dengan munculnya masalah-masalah akibat kehidupan penduduk yang dinamis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan di beberapa sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan misalnya permasalahan yang umum terjadi di Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan oleh banyak pakar mengenai studi kota, bahwa penduduk akan bertempat tinggal di kota dan kawasan sekitar kota. Hal ini didasarkan bahwa jumlah penduduk kota di dunia mempunyai kecenderungan makin besar dan tidak terkecuali pada Kota Makassar.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang tumbuh cepat secara alamiah baik dilihat dari jumlah penduduknya maupun dari kemampuan ekonominya yang berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana.

Secara umum, tingkat pengangguran Sulawesi Selatan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun demikian Sulawesi Selatan belum berhasil mengungguli 4 provinsi lain di kawasan pulau Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat). Tingkat pengangguran Sulawesi Selatan adalah kedua tertinggi untuk pulau Sulawesi, dimana nilai tertinggi yaitu 10,65 untuk daerah Sulawesi Utara berturut-turut di bawahnya adalah Sulawesi Selatan 9,04, Sulawesi Tenggara 5,73, Gorontalo 5,65, Sulawesi Tengah 5,45 dan provinsi dengan tingkat pengangguran terendah yaitu 4,57 untuk Provinsi Sulawesi Barat.¹

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menganggur atau yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya.²

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah upah. Upah yang di terima buruh harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat upah yang seimbang. Upah adalah pendapatan masyarakat yang mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud.³

¹ Statistik Indonesia., Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

² Subandi., *Ekonomi Pembangunan* (Bandung : Alfabeta, 2011) h. 98

³ Todaro., *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga* (Jakarta : Erlangga, 2000) h. 10

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dari ketiga variabel makro ekonomi tersebut. Lebih lanjut akan di analisis mengenai pengaruh dari jumlah penduduk dan tingkat upah terhadap besar kecilnya pengangguran di Kota Makassar.

TINJAUAN TEORITIK

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha.

Besarnya upah bagi seorang tenaga kerja kadang-kadang sulit untuk ditentukan, bila hal ini ditanyakan kepada seorang tenaga kerja jawaban yang diperoleh tentu sangat bervariasi, malah kadang-kadang diperoleh jawaban '*asal cukup untuk hidup*'. Tingkat upah yang '*cukup*' dapat disejajarkan dengan tingkat upah yang *wajar*. Ada beberapa konsep ekonomi yang membahas mengenai tingkat upah yang wajar. Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah.

Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam perusahaan, karena ketidak tepatan dalam menentukan besarnya upah akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karenanya ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yaitu sebagai berikut :⁴

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung turun.

2. Organisasi Buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya organisasi buruh akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.

⁴ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi, Pengangguran dan Teori Pertumbuhan Penduduk, Edisi Keenam* (Jakarta : Erlangga, 2006) h.160

3. Kemampuan Untuk Membayar

Pemberian upah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan.

4. Produktivitas Kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan, maka semakin besar upah yang mereka terima. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

5. Biaya Hidup

Di kota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

6. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan.

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya industri sektoral, peningkatan produktivitas kerja nasional, peningkatan etos dan disiplin kerja, dan memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi.

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPENDUDUKAN

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu disebutkan pula perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.⁵

Kependudukan juga hal yang tidak bisa lepas dari negara kita, disamping karena negara kita termasuk negara terbesar di dunia negara kita juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berikut beberapa masalah kependudukan yang ada di Indonesia :⁶

1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
2. Penyebaran penduduk yang tidak merata
3. Urbanisasi yang relatif tinggi
4. Kualitas sumber daya manusia rendah
5. Struktur umur penduduk yang berusia
6. Tingkat pemanfaatan program pemerintah masih kurang
7. Pernikahan usia dini
8. Tingkat kelahiran yang sangat tinggi

Dari beberapa faktor yang diungkapkan diatas tadi, tingkat kelahiran menjadi hal yang paling berpengaruh dalam meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah kelahiran di pengaruhi berbagai macam hal di antaranya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan program yang telah digalakkan oleh pemerintah. Dalam menjalankan pemanfaatan program pemerintah peran serta masyarakat sangat penting karena dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan program tersebut berarti proses pengendalian yang diusung oleh pemerintah boleh dikatakan bisa berjalan dengan baik.⁷

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menganggur atau yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya.⁸

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi terutama masalah ketenagakerjaan, karena kemampuan negara sedang berkembang dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas. Melihat keadaan tersebut maka pertumbuhan penduduk biasanya dapat menimbulkan berbagai masalah seperti struktur umur, makin meningkatnya jumlah pengangguran, urbanisasi dan sebagainya.⁹

⁵ Sediono M.P. Tjondronegoro, *Ilmu Kependudukan* (Jakarta : Erlangga Soft Cover, 1984) h.72

⁶ *Ibid.*, h. 74

⁷ Sediono M.P. Tjondronegoro, *op.cit.*,h.98

⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005) h. 70

⁹ Subandi, *op.cit.*, h. 99

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat dan juga menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan para ahli, dan masing-masing dari mereka berusaha mencari faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.

Umumnya para ahli dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari penganut aliran *Malthusian*. Aliran *Malthusian* dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, dan aliran *Neo Malthusian* dipelopori oleh Garreth Hardin dan Paul Ehrlich. Kelompok kedua terdiri dari penganut aliran *Marxist* yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Kelompok ketiga terdiri dari pakar-pakar teori pertumbuhan penduduk mutakhir yang merupakan reformulasi teori-teori kependudukan yang ada. Beberapa pendapat dari pakar teori pertumbuhan penduduk tersebut ialah :¹⁰

a) Menurut Neo-Malthusian (*Garreth Hardin & Paul Ehrlich*)

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali, kelompok ini menyongkong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara "Preventif Check" yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu di sebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.¹¹

Didalam proses meminimalisir pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan beberapa tahap-tahap yang sudah di desain sedemikian baiknya agar pada saat melaksanakan proses tersebut dapat berjalan dengan baik, karena setiap saat pertumbuhan penduduk dapat berubah-ubah, maka dari itu pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya atau perbandingan populasi yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam suatu populasi.

Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah ialah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang dapat merubah pola pikir masyarakat tentang perlunya meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk, dan untuk menunjang keberhasilan proses ini peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila masyarakat hanya menjadi pendengar saja

¹⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 97

¹¹ *Ibid.*,h. 99

tanpa ada respon yang dilakukan, semuanya hanya akan menjadi suatu yang tidak berarti dan boleh dikatakan tidak ada manfaat yang dapat mereka peroleh.¹²

b) Aliran *Malthusian*

Aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Maltus, seorang pendeta Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834. Pada permulaan tahun 1798 lewat karangannya yang berjudul: "*Essai on Principle of Populations as it Affect The Future Improvement of Society, with Remarks on The Specculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*", menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini.¹³

Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan tidak bisa dihentikan. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa untuk hidup manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Inilah sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia.

c) Teori *John Stuart Mill*

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian ia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktifitas seseorang tinggi ia cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah.¹⁴

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGGURAN

Pengangguran (*unemployment*) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami banyak negara. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Namun, kebijakan pemecahannya sudah barang tentu harus di alamatkan kepada apa yang menjadi penyebabnya.

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha dapat menjual barang dan jasa dengan

¹² Simanjuntak, *op.cit.*, h. 29

¹³ Sediono M.P. Tjondronegoro, *op.cit.*, h.117

¹⁴ Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Perkasa, 1999) h.185

maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin besar juga barang yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat perhubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.¹⁵

Menganggur tidak sama dengan tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, tidak dapat di katakan sebagai pengangguran. Sebab jika dia mencari pekerjaan (ingin bekerja), mungkin dengan segera mendapatkannya. Kalau begitu mengapa tidak mau bekerja? Mungkin karena sudah kaya! Misalnya, tabungannya sudah mencapai Rp 3 miliar. Jika tingkat bunga deposito bersih (setelah dipotong pajak) 1% per bulan (12% per tahun), maka tanpa bekerja penghasilannya mencapai Rp 30 juta per bulan. Sudah lebih dari cukup. Alasan-alasan lain yang membuat orang tidak (mau) bekerja antara lain adalah ibu-ibu yang harus mengasuh anak, kawula muda yang harus sekolah / kuliah dahulu.¹⁶

Secara makro, pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan suatu pemborosan. Apabila dikaitkan dengan *opportunity cost* yang dikorbankan oleh negara akibat menganggurnya angkatan kerja terdidik terutama pendidikan tinggi. Namun dari pandangan mikro, menganggur mempunyai tingkat utilitas yang lebih tinggi daripada menerima tawaran kerja yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Utilitas yang dimaksud adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu dari bekerja atau melakukan suatu aktivitas sehingga seseorang yang menganggur memiliki urutan alternatif-alternatif atas aktivitas yang disukainya dibandingkan dengan seseorang yang menerima tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan aspirasinya.

Definisi ekonomi tentang pengangguran tidak identik dengan tidak (mau) bekerja. Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi, tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja.¹⁷ Menurut konsep Labour Force Framework penduduk dibagi dalam beberapa kelompok yang digambarkan dalam Gambar 1.

Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja, entah karena harus mengurus keluarga atau sekolah, tidak termasuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan. Besar

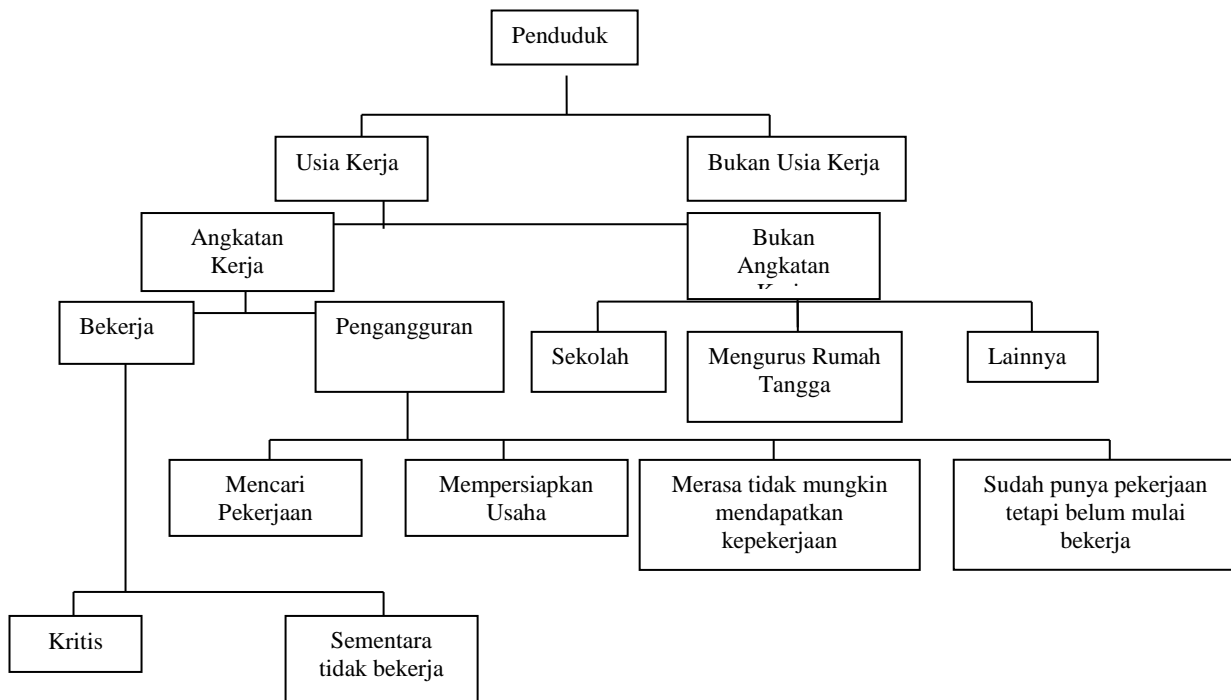
¹⁵S.Marcelius, *op.cit.*,h. 13

¹⁶ *Ibid.*, h. 15

¹⁷ Michael P Tadoro, *op.cit.*,h. 87

kecilnya pengangguran sangat bergantung dari definisi atau pengklasifikasian pengangguran. Setidaknya ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan angkatan kerja (*labour force approach*) dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*).¹⁸

Gambar 1
Diagram Ketenagakerjaan



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif *Kuantitatif*, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Definisi lain dari data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yaitu, pengumpulan data yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi sebanyak

¹⁸ Prathama Rahardja & Mandala Manurung., *Pengantar ilmu Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi edisi ketiga)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008) h.381

mungkin yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, internet, literatur laporan bentuk yang terkait, dan lain sebagainya.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi berganda dengan teknik *Ordinary Least Square* (OLS). Untuk mengetahui pengaruh variable Upah (X_1), dan Pertumbuhan Penduduk (X_2) yang berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar digunakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \mu_i \dots\dots$$

Dimana:

Y	=	Pengangguran
X_1	=	Upah
X_2	=	Pertumbuhan Penduduk
B_0	=	Koefisien konstanta
β_1, β_2	=	Koefisien regresi
Ln	=	Logaritma Natural
μ_i	=	Error Term

Untuk memperoleh nilai estimasi yang memenuhi kaidah BLUE, maka dilakukan uji statistik berupa uji koefisien determinasi dan uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis (*F-test* dan *t-test*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM VARIABEL PENELITIAN

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga ke arah timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan pusat kegiatan industri di Makassar.

Sejalan dengan perkembangannya saat ini dinamika pengembangan wilayah dengan konsentrasi pembangunan seakan terus berlomba di atas lahan kota yang sudah semakin sempit dan terbatas. Sebagai imbasnya tidak sedikit lahan yang terpakai saat ini menjadi lain dalam peruntukannya, hanya karena lahan yang

dibutuhkan selain sudah terbatas, juga karena secara rata-rata konsentrasi kegiatan pembangunan cenderung hanya pada satu ruang tertentu saja.

Penduduk Kota Makassar dari waktu ke waktu terus bertambah dan semakin banyak saja. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki. Program kependudukan di Kota Makassar seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Berikut ini adalah data jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya di Kota Makassar selama periode penelitian.

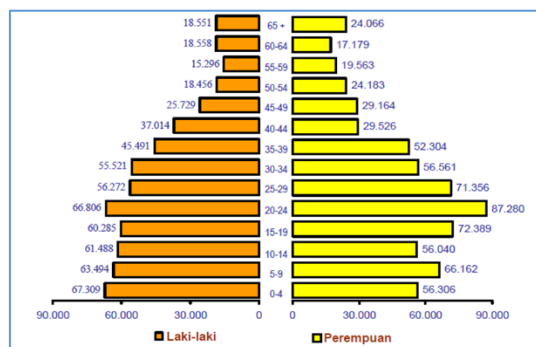
Tabel 1
Jumlah dan Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
2007	1.235.239	0,96
2008	1.253.656	1,49
2009	1.272.349	1,50
2010	1.339.374	1,65
2011	1.352.136	0,95

Sumber: Makassar dalam Angka, 2012 (diolah)

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar antara lain dipengaruhi oleh posisinya sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, disamping itu secara geografis Kota Makassar berada pada posisi yang strategis sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia yang berimplikasi pada derasnya arus urbanisasi maupun migrasi masuk dari kabupaten/kota lainnya dan provinsi lain di luar Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

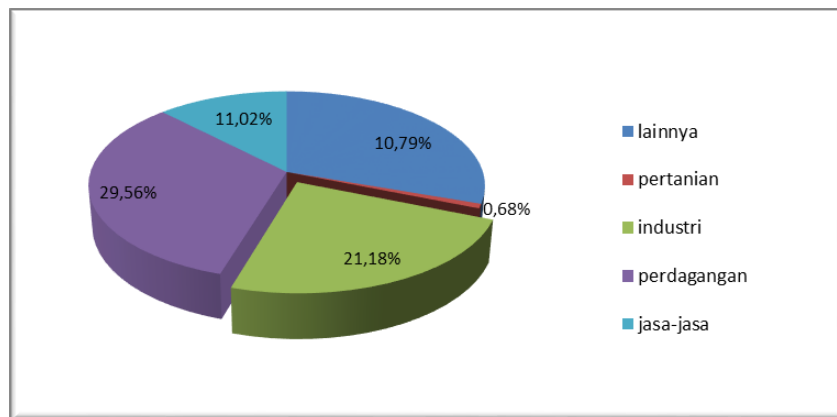
Gambar 2
Piramida Penduduk Kota Makassar Tahun 2010



Sumber: BPS Kota Makassar, 2013 (diolah)

Indikator lainnya yang juga menjadi salah satu indikator ekonomi makro adalah mengenai jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh Kota Makassar dapat dilihat dari komposisi penduduk yang berada di usia kerja. Indikator tersebut disajikan dalam piramida penduduk seperti pada Gambar 2 di atas. Komposisi penduduk kota Makassar menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa kelompok penduduk produktif (berumur 20-54 tahun) mencapai 52% (305.289 laki-laki dan 350.374 perempuan). Dari jumlah tersebut, dapat dianalisis lebih rinci hingga persebarannya berdasarkan pada lapangan kerja yang mereka tempati. Rinciannya tersaji dalam ilustrasi berikut ini.

Gambar 3
Komposisi Tenaga Kerja di Kota Makassar Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2010



Sumber: BPS Kota Makassar, 2013 (diolah)

Pada Gambar 3 diatas menjelaskan tentang keberadaan sektor perdagangan dan industri memberikan alternatif dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Makassar dan wilayah sekitarnya. Hal ini membuktikan terbukanya peluang peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga di Kota Makassar yang menyediakan tenaga kerja yang menjadi input produksi dalam hal perdagangan dan industri. Secara umum banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor perdagangan di Kota Makassar mencapai 29,56% dan pada sektor industri mencapai 21,18% pada tahun 2009. Sedangkan pada sektor jasa-jasa yang mencapai 11,02% dan sektor lainnya, seperti keuangan dan persewaan yang mencapai 10,79% menunjukkan angka lebih tinggi daripada aktivitas lapangan usaha pertanian yang hanya mencapai 0,68% pada tahun 2009. Dengan rendahnya aktivitas lapangan usaha pertanian, maka di perkirakan proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor perdagangan dan industri akan jauh lebih besar.

Mengenai upah pada dasarnya ditafsirkan sebagai sumber utama penghasilan seseorang, oleh sebab itu upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarga dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum atau sering disebut Kebutuhan Fisik

Minimum (KFM). Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara Minimum Regional, sektoral Regional maupun Subsektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Upah pokok minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik Regional, Sektoral maupun Subsektoral. Dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan.

Dari definisi di atas, terlihat dua unsur penting yaitu:

1. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Tingkat upah mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat dan sebaliknya. Tingkat upah mempunyai peranan langsung terhadap waktu kerja yang ditawarkan. Pada kebanyakan orang, upah yang tinggi menjadi rangsangan atau motivasi untuk bekerja, secara umum upah mempunyai korelasi positif dengan waktu kerja yang ditawarkan. Pada kebanyakan orang upah yang tinggi menjadi rangsangan atau motivasi untuk bekerja, secara umum upah mempunyai korelasi positif dengan waktu kerja yang ditawarkan.

Upah merupakan salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran ketenaga kerjaan mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Michael yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan kualitas tenaga kerja, sedangkan jika tingkat upah yang ditawarkan rendah akan menyebabkan kualitas tenaga kerja yang kurang terlatih.

Besarnya upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan biasanya ditentukan oleh tingkat produktifitas, kualitas dan waktu kerja para tenaga kerja itu sendiri. Dalam menentukan upah kerja biasanya perusahaan menetapkan target pencapaian hasil kerja sesuai dengan jam kerja yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat produktivitas yang layak untuk diupahkan.

Perkembangan tingkat Upah Minimum Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku juga di Kota Makassar terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 yang disajikan di bawah ini.

Dari data Upah Minimum tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2001, upah minimum perbulan yang berlaku di Kota Makassar sebesar Rp. 300.000, Pada tahun 2002, meningkat menjadi Rp. 375.000. Pada tahun 2003, kembali meningkat menjadi Rp. 415.000. Pada tahun 2004, meningkat menjadi Rp. 455.000. Tahun 2005, meningkat lagi menjadi Rp. 510.000. Pada tahun 2006, kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 612.000. Kemudian ditahun 2007, meningkat lagi menjadi Rp. 673.200. Pada tahun 2008, meningkat menjadi Rp. 740.520. Tahun 2009 terus

mengalami peningkatan sebesar Rp. 905.000 hingga pada tahun 2011 mencapai Rp. 1.100.000.

Tabel 4
Perkembangan UMR Kota Makassar

Tahun	UMP Perbulan (Rp)	Persentase
2007	673.200	10.00
2008	740.520	10.00
2009	905.000	22.21
2010	1.000.000	10.50
2011	1.100.000	10.00

Sumber: Disnakertrans Kota Makassar, 2013

Indikator terakhir adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang sedang mencari kerja contoh ibu rumah tangga, siswa sekolah, mahasiswa perguruan tinggi yang karena sesuatu hal tidak/belum mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Tingkat Pengangguran Kota Makassar

Tahun	Jumlah Pengangguran (dalam jiwa)	Tingkat Pengangguran (dalam persen)
2007	372.714	11,25%
2008	311.768	9,04%
2009	314.664	8,90%
2010	298.952	8,37%
2011	293.477	7,63%

Sumber: BPS Kota Makassar, 2013 (diolah)

Dari informasi yang diberikan oleh Tabel 5 tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Kota Makassar mengalami tren penurunan yang cukup besar. Kalau dilihat, signifikansi penurunan jumlah pengangguran cukup drastis dimana pada tahun 2007 besarnya pertumbuhan pengangguran mencapai 11,25 persen. Namun demikian, jumlah ini mengalami penurunan terus

menerus hingga pada tahun 2011 hanya tinggal 7,63 persen dari tahun sebelumnya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

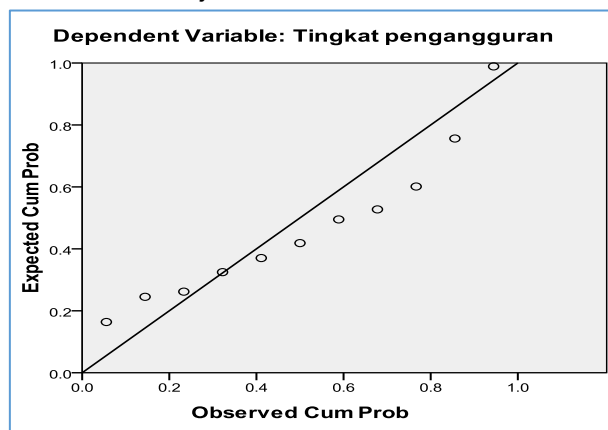
Telah dijabarkan dalam metode penelitian, bahwa penelitian ini hendak mengkaji dampak pertumbuhan penduduk dan tingkat upah terhadap pengangguran di Kota Makassar. Oleh karena itu, untuk mengukur pengaruh tersebut digunakan metode OLS dengan regresi berganda. Langkah pertama analisis data dimulai dengan melihat koefisien determinasi (R^2) dari persamaan penelitian ini.

Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa nilai R-square (R^2) model penelitian adalah sebesar sebesar 0,826 yang berarti 82,6%. Hasil R square (R^2) diperoleh dari hasil pengkuadratan R yaitu = 0,909 x 0,909. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel bebas yaitu variabel upah (X_1) dan pertumbuhan penduduk (X_2) terhadap variabel terikat tingkat pengangguran (Y) sebesar 82,6% sisanya sebesar 17,4% ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar model.

Setelah melihat nilai R-square persamaan penelitian, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dibutuhkan guna memperoleh estimator yang memenuhi kaidah BLUE (*Best Linier Unbias Estimate*). Adapun uji asumsi klasik yang dijalankan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas data dilakukan dengan melihat grafik Normal P-P plot of regression Standardized Residual. Hasilnya ditunjukkan dalam Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4
Uji Normalitas Data



Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression Standardized Residual, terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data upah dan pertumbuhan penduduk normal dan model

regresi layak dipakai untuk memprediksi tingkat pengangguran berdasarkan variabel bebasnya.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap multikolinearitas data. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (Multikol). Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat melalui VIF (*variance inflation factor*) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasikan bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

Besaran VIF (*variance inflation factor*) dan Tolerance, pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah :

- 1) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1
- 2) Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1

Adapun hasil pengujian teringkas dalam Tabel 6 berikut :

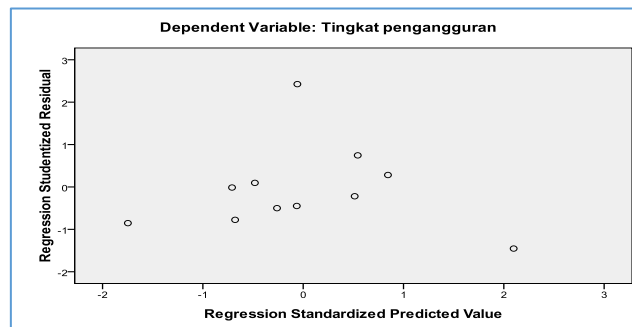
Tabel 6
Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keputusan terhadap Asumsi Multikolinieritas
Upah (X_1)	0,932	1.253	Terpenuhi
Pertumbuhan Penduduk (X_2)	0,932	1.253	Terpenuhi

Pada tabel diatas terlihat bahwa kedua variabel bebas memiliki besaran angka VIF di sekitar angka 1 (Upah = 1.253 dan Pertumbuhan Penduduk = 1.253) besaran angka Tolerance semuanya mendekati angka 1 (Upah = 0,932 dan Pertumbuhan Penduduk = 0,932) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas antara kedua variabel bebas dan model regresi layak digunakan.

Adapun pengujian asumsi klasik yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan melihat *scatter plot* dari hasil regresi. Hasilnya ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 5
Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik *scatterplot* tersebut, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Tingkat Pengangguran berdasar masukan variabel independennya.

Setelah model lolos dari semua pengujian asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian statistik. Pengujian statistik yang dijalankan dalam penelitian ini berupa uji F dan uji t persamaan regresi penelitian.

Tabel 7
Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi (b)	t	Sig
Upah (X ₁)	0,253	4.977	0,012
Pertumbuhan Penduduk (X ₂)	0,173	3.767	0,028
Konstanta	= 11.097		
R	= 0,909	F _{tabel}	= 4.10
R square	= 0,826	T _{tabel}	= 1.39628
Adjusted R Square	= 0,802		
F _{hitung}	= 15.989		
Signifikansi F	= 0,003		

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* secara signifikan terhadap variabel *dependen*. Dimana jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima atau variabel *independen* secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *dependen* (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5 %. Hasil regresi diperoleh nilai F hitung = 15.989 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel upah (X₁) dan pertumbuhan

penduduk (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran (Y). Dengan demikian hipotesis yang diajukan di terima.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel *independen* dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel *dependent* secara nyata. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 diterima (signifikan) dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. Analisis Regresi menunjukkan koefisien regresi (B) variabel upah adalah sebesar 25,3% terhadap tingkat pengangguran, dengan signifikansi 0,012. Hal ini berarti bahwa memang upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Analisis regresi juga menunjukkan Koefisien Regresi (B) variabel pertumbuhan penduduk sebesar 17,3% terhadap tingkat pengangguran, dengan signifikansi 0,028. Ini berarti pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini berarti sesuai hipotesis karena seluruh variabel menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di terima.

Nilai tingkat pengangguran (Y) dari persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebesar 11.097. Yang dimana konstanta berarti variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Sedangkan nilai upah (X_1) pada persamaan diatas adalah sebesar 0,253 menunjukkan koefisien regresi (b) sebesar 25,3% terhadap tingkat pengangguran dengan signifikan 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa variabel upah (X_1) memang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran. Koefisien regresi (b) sebesar 25,3% menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan satu upah (X_1), maka akan menambah atau mengurangi tingkat pengangguran sebesar 25,3%. Sedangkan nilai pertumbuhan penduduk (X_2) sebesar 0,173 menunjukkan koefisien regresi (b) sebesar 17,3% terhadap tingkat pengangguran dengan signifikan 0,028. Hal ini berarti bahwa variabel pertumbuhan penduduk (X_2) memang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Koefisien regresi (b) sebesar 17,3% menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan satu pertumbuhan penduduk (X_2), maka akan menambah atau mengurangi tingkat pengangguran sebesar 17,3%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Secara Simultan, upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar periode tahun 2001-2011.
2. Secara Parsial dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar periode tahun 2001-2011. Pengaruh

positif menunjukkan bahwa apabila menurunnya tingkat upah maka akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Kota Makassar.

- b. Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar periode tahun 2001-2011. Pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan menyebabkan peningkatan pula pada tingkat pengangguran di Kota Makassar.

Berdasarkan pada kesimpulan dan hasil pembahasan penelitian, maka dapat direkomendasikan beberapa saran. Pertama, pada usia tertentu para pencari kerja diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi tentang lowongan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki, sebab sebagian besar perusahaan lebih mengutamakan pencari kerja dengan usia muda karena usia muda merupakan usia yang masih sangat produktif dalam bekerja. Hal ini tentunya tidak sulit lagi, mengingat begitu pesatnya kemajuan teknologi yang ada pada masa sekarang sehingga pencari kerja dapat dengan mudah memperbaharui informasi yang mereka inginkan, sehingga kemungkinan antara si pencari kerja dan pemberi pekerjaan dapat dengan mudah berkomunikasi. Kedua, perlu menanamkan jiwa kewirausahaan bagi kelompok pencari kerja dengan pendidikan tinggi agar pengangguran terdidik dapat memberikan solusi dalam menciptakan pekerjaan. Karena, pencari kerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi akan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Ketiga, pemerintah pun dituntut untuk lebih sigap dalam mengatasi masalah pengangguran terdidik yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Pemerintah perlu membangun suatu sistem yang mengelola seluruh informasi di pasar kerja dimana sistem tersebut dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik itu masyarakat pencari kerja maupun masyarakat yang sedang mempersiapkan diri untuk turun dalam pasar kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Umran, Prof. (1997), *Islam dan KB*, Jakarta: PT Lentera Basritama
- Arsyad, Arsyad, (2010) *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Edisi kelima, UPP STIM YKPN
- Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2001). *How To Research*. Maidenhead: Open University Press.
- BPS, *Makassar Dalam Angka Berbagai Edisi*.
- , *Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar Berbagai Edisi*
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.

- Creswell W. Jhon. 2003. *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Yogyakarta : ISBN.
- Depnakertrans. 2004. *Penanggulangan Pengangguran di Indonesia*. Majalah Nakertrans Edisi-03 TH. XXIV-Juni
- Dian Octaviani, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, Jakarta : Media Ekonomi, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8. 2001
- Hardiani & Junaidi, *Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan*. (Hamada Prima, 2009)
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Jakarta : Erlangga. 2008
- Kasiram M., *Metode Penelitian : Edisi Keempat* (Jakarta, 2006. Hal.274)
- Kuriata Ginting S., Charisma, 2008, *Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Tesis.
- Mankiw N. Gregory, *Makroekonomi (edisi keenam)*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2006
- M. Akbar Ilham. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Makassar*. Skripsi Makassar. UNHAS
- Raharja Prathama. *Pengantar ilmu Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi edisi ketiga hal.375)*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2008
- Silalahi, U. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- S.Marcelius *Ekonomi Kependudukan : The economic of population an introduction* (Surakarta;Sebelas Maret, 1988)
- Soeroto, 2002, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Jakarta :Gajah Mada University Press
- Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Makassar
- Subandi, (2011) *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Edisi Pertama, Alfabeta
- Sumarsono, Sonny, (2009) *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia* , Yogyakarta: Edisi Pertama, Garaha Ilmu.
- Tjondronegoro M.P. Sediono, *Ilmu Kependudukan*. (Jakarta : Erlangga Soft Cover, 1984)
- Todaro. Michael p. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga edisi ketujuh terjemahan haris munandar*. Erlangga. Jakarta
- Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/92)
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: pada Pasal 7 ayat (1)

